

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 603 adalah sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada waktu PKP calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi kepada pasien dengan baik, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.
3. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti cara penggunaan yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat Apoteker juga harus memberitahukan terapi non farmakologi yang dapat dilakukan pasien, serta hal penting lainnya terkait obat seperti efek samping, waktu kadaluarsa (obat racikan), dan cara penyimpanan obat.

4. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan tentang keluhan yang dirasakannya dan obat-obat yang sudah di gunakan tanpa diketahui orang lain.
5. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.
6. Apotek harus lebih tekun dalam menerapkan pelayanan kefarmasian yang berpihak kepada pasien dengan meningkatkan penulisan patient medication record yang sangat penting untuk merangkum pengobatan dan perkembangan kesehatan pasien. Pelayanan *home care*, dan telepharma juga harus ditingkatkan karena kedua hal tersebut juga merupakan sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien
7. Apotek Kimia Farma 603 disarankan untuk memperbaiki kembali saluran air untuk meningkatkan kenyamanan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anief, M. 2005. *Manajemen Farmasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005. *Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus*. Jakarta: Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006. *Pedoman penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas*. Jakarta: Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005. *Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hipertensi*. Jakarta: Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang No.35 tentang *Narkotika Tahun 2009*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/ Menkes/ SK/ IX/ 2004 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.

Hartini, Y.S., & Sulasmono, 2007, *Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotek Rakyat*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Kimia Farma, Diakses pada tanggal 28 Januari 2018. <http://www.kimiafarma.co.id/profil/profilperusahaan/sejarah.html>.

Keputusan Menteri Kesehatan, 1990. Nomor 374/ MenKes/ SK/ VII/ 1990. tentang *Obat Wajib Apotek* Menteri Kesehatan. Jakarta, Menteri Kesehatan.

Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M. and Lance, L. L., 2009. *Drug Information Handbook*, ed. 17th, American Pharmacists Association, North American.

McEvoy, G. K., 2011. *AHFS Drug Information Essential*, American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.

Medscape. 2018. *Medscape: Drug & Diseases*. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada Januari 2018.

- MIMS. 2018. MIMS Indonesia <http://www.MIMS.com> [online].
Diakses pada] Januari 2018.
- Monthly Index of Medical Specialities (MIMS), Inc., [2015].,
MIMS Drug Information
System. <http://mims.com/Indonesia/drug/info/Buscopan%20Plus/>, Diakses pada Januari 2018.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.919/Menkes/ Per/X/1993 tentang
Kriteria Obat yang dapat Diberikan tanpa Resep, Menteri
Kesehatan, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 1997. Undang-Undang No. 5
tentang *Psikotropika*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2002. *Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/ Menkes/
SK/ X/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Izin Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009
tentang *Pekerjaan Kefarmasian*, Presiden Republik Indonesia,
Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009. *Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian* , Menteri Kesehatan
Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang No. 35
tentang *Narkotika*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

- Presiden Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Per Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 tentang *Narkotika*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang *Pelayanan kefarmasian*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *No. 73 Tahun 2016* tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2016 tentang *Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017 tentang *Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L., 2008. *Manajemen Farmasi : Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar*

Farmasi, Industri Farmasi, ed. 2, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.

Stockley., Baxter, K., 2009. *Drug Interactions: 9th Edition*. Pharmaceutical Pr, London.

Sukandar E., 2013. *Infeksi Saluran Kemih Pasien Dewasa*, dalam : Sudoyo AW.,Setiyohadi B., Alwi L., dkk., 2006. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6355/ Dirjen/ SK/ 69 tanggal 28 Oktober 1969.

Sweetman, S. C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference*, ed. 36th, The Pharmaceutical Press, London.